

**REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MELALUI MODEL BELAJAR PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN
(PROJECT CITIZEN)¹**

Oleh: Rima Vien PH²

ABSTRAK

In addition to civic knowledge, *Project Citizen* aims to foster the skills necessary for citizenship kewargangaraan democracy. Various aspects of the program and student interaction with their classmates, government representatives, and non-governmental organizations at the time of intensive research on community problems allows the students have many opportunities to apply the intellectual skills and abilities to participate. Furthermore, through their participation in *Project Citizen*, students have the opportunity to develop a variety of civic character of a democratic society such as the meaning of political values, political interests, political tolerance, commitment to the exercise of democratic citizenship, commitment to civic responsibility, commitment to constitutionalism, and the tendency to participate. The characteristics of these traits, which can be developed through *Project Citizen*, encourage responsible participation and effective by the citizens in a democracy which they run.

KATA KUNCI: Pendidikan Kewargangeraan, *Project Citizen*

¹ Artikel non penelitian

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan/ PKN dapat dilihat dalam lima status (Udin S Winataputra, 2001). Kelima status itu adalah *Pertama*, sebagaimana pelajaran di sekolah. *Kedua*, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. *Ketiga*, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. *Keempat*, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crash program. *Kelima*, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Dalam statusnya yang pertama kita bisa menyebutnya sebagai PKN persekolahan. PKN persekolahan dalam sejarahnya sering berganti-ganti. Bahkan dapat dikatakan dari sekian mata pelajaran di sekolah, mata pelajaran inilah yang paling sering berganti atau berubah nama. Perubahan tersebut adalah munculnya pelajaran Kewarganegaraan (1957), Civics (1961), Pendidikan Kewarganegaraan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila/PMP (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /PPKn (1994), Kewarganegaraan (uji coba kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Karakteristik dari Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 atau PKN

persekolahan sekarang ini dapat disimak dari uraian tentang pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Standar Isi dari Pendidikan Kewarganegaraan (Permendiknas No 22 tahun 2006). Dinyatakan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jika dalam pelajaran PMP dan PPKn sebelumnya masih terdapat nuansa tentang pendidikan nilai atau moral, maka dalam rumusan baru ini menimbulkan pertanyaan apakah PKN

masih mengemban fungsinya sebagai pendidikan nilai moral di Indonesia. Harus diakui bahwa ketika pendidikan kewarganegaraan persekolahan muncul dalam mata pelajaran PMP atau PPKn amat kental perwujudannya sebagai pendidikan nilai.

Dari uraian-uraian yang ada dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 menyiratkan bahwa PKn persekolahan memandang penting untuk diarahkan sebagai pendidikan yang membawa kearah kehidupan yang demokratis dalam diri peserta didik, bahwa kehidupan demokrasi perlu ditumbuhkembangkan dalam berbagai lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan system politik dan pemerintahan demokrasi di Indonesia. Di sisi lain adalah pentingnya peserta didik yang demokratis tetapi juga yang memiliki semangat kebangsaan, memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern dan secara historis pada negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sampai pada batas ini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan/ PKn persekolahan mengemban 3 fungsi. *Pertama*, sebagai

pendidikan (politik) demokrasi yaitu proses secara sadar untuk mentransformasikan, mensosialisasikan demokrasi pada diri peserta didik. *Kedua*, sebagai pendidikan tentang semangat dan wawasan kebangsaan yaitu usaha sadar menanamkan pentingnya kesadaran, semangat dan wawasan kebangsaan Indonesia. Dan *ketiga*, sebagai pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan tentang pemahaman akan hubungan antara warganegara dengan negara.

Dalam pandangan penulis, PKn persekolahan sekarang ini masih mungkin didalamnya mengemban fungsinya sebagai pendidikan nilai moral meskipun tidak secara eksplisit ada dalam standar isi Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan. Harus diakui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini menampakkan diri untuk kembali pada *body of knowledge* dari civis yaitu demokrasi politik dengan tiga komponennya yaitu *civics knowledge*, *civics disposition* dan *civics skill*. Berdasarkan dengan hal ini Udin S Winataputra (2001) mengatakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana sistematis pendidikan demokrasi. Porsi PKn sebagai pendidikan politik demokrasi lebih besar daripada fungsinya selaku pendidikan nilai maupun pendidikan kebangsaan.

Fungsi PKn sebagai pendidikan nilai dapat kita sarikan dari pernyataan bahwa PKn berfungsi sebagai pembentukan *karakter warganegara*. PKn persekolahan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan *berkarakter* yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Karakter yang dimaksud tentu saja karakter yang berpedoman pada nilai luhur bangsa dalam hal ini Pancasila. Karakter kewarganegaraan baik untuk pribadi maupun masyarakat Indonesia adalah karakter yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.

RASIONAL MODEL BELAJAR KEWARGANEGARAAN (PROJECT CITIZEN)

Dalam Standar Isi dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada dua tujuan utama. *Pertama*, pembentukan warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. *Kedua*, pengembangan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan *berkarakter* yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Adapun konfigurasi PKn dibangun dalam tiga kerangka sistemik, yakni PKn ditinjau secara kurikuler, teoretik, dan programatik (Budimansyah, 2006).

Secara *kurikuler*, PKn dirancang sebagai subyek pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik mampu: (a) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (c) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasar karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama

dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (d) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Secara *teoretik*, PKn dirancang sebagai subyek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara *programatik*, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Namun sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan tinggi), PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidik serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis (sebelum era reformasi) dan

kehidupan masyarakat yang dihindari *euforia* kebebasan (setelah era reformasi). Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empiric yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama*, proses pembelajaran PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai "*hidden curriculum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui pelibatangannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan ketrampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala

kurikuler dan sosio-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif, afektif, psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.

Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PKn juga menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala eksisnya. PKn dilaksanakan secara paradigmatic sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral (Winataputra, 2001). Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya direspons dan diakomodasikan secara proporsional karena memang pendidikan secara umum dan PKn secara khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggung jawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.

Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap

waktu, baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang program pendidikan yang mengakomodasi kecenderungan dan persoalan global tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah dalam bidang pendidikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*power full learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri ; bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*). Satu model adaptif untuk melakukan revitalisasi PKn adalah melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*) (Winataputra dan Budimansyah, 2007).

DASAR PEMIKIRAN *PROJECT CITIZEN*

Terdapat satu kerangka yang terdiri atas lima bagian tentang dasar pemikiran dari *Project Citizen*. *Pertama*, demokrasi memerlukan pemerintahan sendiri dan karenanya memerlukan keterlibatan aktif dan berpengetahuan dari semua warga negara dalam kehidupan berwarganegara (Branson, 1999: 2-3). Satu Komponen yang sangat diperlukan tentang keterlibatan warganegara adalah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik (Branson, 1999: 9-11). Jadi, para siswa

belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik sehingga menghasilkan pengetahuan, kecakapan, dan watak yang sangat dibutuhkan untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan warganegara.

Kedua, para siswa harus belajar bagaimana dirinya terlibat dalam kehidupan berwarganegara dengan cara terjun secara langsung dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Para siswa yang dilibatkan dalam pembelajaran secara langsung praktik lapangan atau melakukan kegiatan eksperimen agaknya lebih antusias dan bersemangat dibanding mereka yang tidak ikut serta dalam jenis kegiatan ini. Lebih lanjut, inti dari PKn kiranya kaya akan nilai jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik dan berwarganegaraan (Branson, 1999: 8-9). Para pendidik bidang sains telah lama menyadari akan pentingnya praktik-praktik laboratorium untuk meningkatkan pembelajaran sains. Konsep yang sama, tentu saja baik bagi PKn, dimana laboratoriumnya adalah masyarakat yang di dalamnya ada anak yang menuntut ilmu. Para pengembang *Project Citizen* menegaskan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan perkembangan kewarganegaraan generasi muda adalah dengan mendorong mereka untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ketiga, karena para siswa tersebut menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka mendapat banyak kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasar dalam ilmu inti satu demokrasi, seperti hal-hal yang meliputi hak individu dan kepentingan bersama,

peraturan golongan mayoritas dan hak kaum minoritas, dan kebebasan serta persamaan (Branson, 1999: 5-6). Hal-hal dan prinsip-prinsip demokrasi ini yang berkenaan denganya merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan yang sangat diperlukan, yang memungkinkan para siswa menjadi warganegara yang bertanggung jawab dan efektif.

Keempat, Project Citizen dimaksud untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja (berusia sekitar 10-15 tahun), tetapi program tersebut juga digunakan oleh para pemuda yang menginjak dewasa di beberapa sekolah. Di usia sekolah menengah, para siswa berusaha membentuk identitas mereka sendiri dan para siswa harus diberikan kesempatan untuk membina hubungan mereka dengan masyarakat. Sebagian besar remaja mulai bergeser dari berpikir kongkret menuju berpikir abstrak dan sering berhadapan dengan masalah baik dan buruk, sah dan tidaknya untuk bertindak (*legitimacy of authority*), dan jawaban-jawaban alternatif atas situasi-situasi yang menyulitkan. Selama masa remaja, para siswa membentuk sikap dan menerima nilai-nilai yang kemungkinan akan mereka pegang sepanjang hidup. Para remaja cenderung ingin tahu mengenal lingkungan di sekeliling mereka, termasuk komunitas mereka sebagai warganegara dan mereka membutuhkan pengalaman-pengalaman dunia nyata untuk menggali hubungan mereka dengan kehidupan berwarganegara.

Kelima, Project Citizen menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan, sebagai anggota yang berharga dari komunitasnya yang

bernilai gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dapat dicurahkan pada masalah-masalah pada kebijakan publik (Branson, 1999: 5-6). Daripada hanya menyiapkan para siswa untuk peran yang akan mereka emban di kehidupan, *Project Citizen* mengharuskan mereka untuk ambil bagian sebagai warganegara. Menurut para pengembang *Project Citizen*, keikutsertaan seperti ini tidak hanya merupakan wahana yang lebih baik untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan yang demokratis, tetapi juga makin baik bagi masyarakat karena para siswa tersebut mempermudah organisasi pemerintahan dan masyarakat madani bekerja melewati masalah-masalah penting di masyarakat. Keikutsertaan dan keterlibatan seperti ini sudah seharusnya membantu kaum muda membina hubungan dengan masyarakat dimana mereka tinggal dan menghargai kontribusi mereka terhadap pemecahan masalah-masalah di masyarakat.

Masalah yang sedang diteliti tersebut berbeda dari satu kelompok siswa dengan siswa lainnya (sebagai contoh, sampah di halaman sekolah, polusi air sungai, lubang besar di jalan utama, kurangnya trotoar menuju dan dari sekolah). Tetapi, pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan yang seharusnya dipelajari dan dibantu berkembang melalui program tersebut ternyata sama, terlepas dari persoalan yang dipilih. Berkenan dengan pengetahuan kewarganegaraan, *Project Citizen* dimaksudkan agar memungkinkan para siswa untuk memahami masalah-masalah kebijakan publik yang penting di masyarakat mereka sendiri, organisasi pemerintah

dan non pemerintah yang memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan publik, dan akan pentingnya tata kelola yang demokratis. Para siswa juga diharapkan mempelajari konsep-konsep penting lainnya yang secara langsung berasal dari masalah yang sedang diteliti. Konsep-konsep dasar dan proses-proses politik tertentu diajarkan kepada semua siswa tanpa memandang masalah apa yang diteliti dan bagaimana memecahkannya.

PENUTUP

Selain pengetahuan kewarganegaraan, *Project Citizen* bertujuan untuk membantu perkembangan berbagai kecakapan kewarganegaraan yang penting bagi kewarganegaraan demokrasi. Berbagai aspek dari program tersebut dan interaksi siswa dengan teman sekelas mereka, perwakilan pemerintah, dan organisasi non-pemerintah pada waktu penelitian yang intensif mengenai masalah masyarakat memungkinkan para siswa memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi. Lebih jauh, melalui keikutsertaan mereka dalam *Project Citizen*, para siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai watak kewarganegaraan dari masyarakat yang demokratis seperti arti nilai politik, kepentingan politik, toleransi politik, komitmen terhadap pelaksanaan hak kewarganegaraan yang demokratis, komitmen terhadap tanggung jawab kewarganegaraan, komitmen terhadap konstitusionalisme, dan kecenderungan untuk berpartisipasi. Ciri-ciri pembawaan ini, yang dapat dikembangkan melalui

Project Citizen, mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dan efektif oleh warganegara dalam demokrasi yang mereka jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M.S. 1999. *The Role of Civic Education*. Calabasas : CCE
- Dasim Budimansyah dan Syaifullah Syam. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Lab PKn UPI
- _____ dan Winataputra. 2007. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Program Pascasarjana UPI : tidak diterbitkan
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Reformasi. Paradigma : Yogyakarta
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi: Lampiran Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan
- Ruminiati. 2006. *Pembelajaran PKn SD*. Jakarta : Royek PJJ S1 PGSD Dikti Depdiknas
- Suwarma Muchtar. *Strategi Pembelajaran PKn* . Modul Jakarta : Universitas Terbuka
- Udin S Winataputra. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Bandung. Program Pascasarjana UPI